

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

###### **2.1.1.1 Pengertian Usaha Mikro**

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 yang memiliki kriteria sebagai berikut :

1. memiliki aset: Maks. 50 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan
2. Omset pendapatan maksimal mencapai 300 juta rupiah per tahun.

Dapat disimpulkan jika usaha mikro adalah usaha yang memiliki aset tidak termasuk tanah dan bangunan jadi berupa kas, persediaan atau aset lancar, aset tetap non gedung dan tanah maksimal 50 juta dan memiliki omset atau pendapatan dibawah 300 juta rupiah digolongkan sebagai usaha mikro

###### **2.1.1.2 Pengertian Usaha Kecil**

Menurut UU nomor 20 tahun 2008 Usaha Kecil adalah usaha yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dan bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria

Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dengan kategori usaha sebagai berikut :

1. Kriteria memiliki aset atau kekayaan bersih: 50 juta - 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Memiliki kriteria Omzet: 300 juta - 2,5 Miliar rupiah per tahun

Dapat disimpulkan jika perusahaan memiliki aset lancar (kas, piutang, persediaan sewa dibayar dimuka dll ) dan aset tetap kecuali tanah dan bangunan di atas 50 juta maksimal 500 juta tergolong usaha kecil, Omzet per tahun di atas 300 juta dan maksimal 2,5 milyar

#### 2.1.1.3 Pengertian Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 dengan criteria sebagai berikut:

1. Kriteria memiliki kekayaan aset kecuali tanah dan bangunan lebih dari 500 juta dan maksimal kekayaan 10 Miliar
2. Memiliki Omzet penjualan tahunan lebih dari 2,5 Miliar - 50 Miliar

Dapat disimpulkan jika usaha tergolong menengah jika jumlah kekayaan perusahaan yaitu aset lancar dan tetap non tanah dan

bangunan di atas 500 juta dan maksimal 10 milyar,serta memiliki omset diatas 2,5 milyar pertahun dan maksimal 50 milyar.

## **2.1.2 Laporan Keuangan**

### **2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai suatu penyajian yang terstruktur tentang posisi keuangn dan kinerja keuangan suatu entitas. (Hans Kartikahadi dkk.2012.Akuntansi Keuangan berdasarakan SAK berbasis IFRSJakarta.Salemba Empat.)

### **2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut.Pengguna tersebut meliputi peyedia sumber daya bagi entitas, seperti kreditor maupun investor.Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (IAI. (2018).Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah. jakarta : Graha Akuntan.

## **2.1.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM)**

### **2.1.3.1 Ruang Lingkup**

SAK EMKM dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro kecil dan menengah. Entitas mikro, kecil dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama 2 tahun berturut-turut.

SAK EMKM dapat digunakan oleh entitas yang tidak memenuhi definisi dan kriteria paragraf kedua di atas, jika otoritas mengizinkan entitas tersebut untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK UMKM. (IAI. (2018). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah. Jakarta : Graha Akuntan.

#### 2.1.3.2 Pengakuan Laporan Keuangan yang sesuai SAK EMKM

Laporan keuangan yang diakui SAK EMKM meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Berikut penjelasan masing masing laporan:

- a. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang mencantumkan nilai dari pos pos aktiva lancar, aktiva tetap, hutang lancar, hutang jangka panjang dan modal pemilik dimana asset di susun berdasarkan tingkat likuiditas dan hutang di susun berdasarkan jatuh tempo.
- b. Laporan Laba Rugi adalah laporan yang mencantumkan nilai nilai dari pos akun nominal yaitu pendapatan dan biaya biaya perusahaan.

c. Catatan Atas Laporan Keuangan berisi suatu pernyataan laporan keuangan di susun atas standar akuntansi selain itu berisi juga kebijakan akuntansi serta merincikan pos pos yang belum jelas Pengakuan Unsur Dalam Laporan Keuangan yang sesuai SAK EMKM

#### 1. Asset

Asset diakui dalam posisi laporan keuangan ketika manfaat ekonominya di masa mendatang dapat dipastikan akan mengalir ke dalam entitas dan asset tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam laporan posisi keuangan jika manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas walaupun pengeluaran telah terjadi. Sebagai alternatif, transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi

#### 2. Liabilitas

Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber daya mengandung manfaat ekonomi dipastikan akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal.

#### 3. Penghasilan

Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomik di masa depan berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal

#### 4. Beban

Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomik di masa depan berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

#### 2.1.3.3 Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan

##### 1. Tingkat Materialitas

Kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos pos laporan keuangan adalah material jika baik sendiri atau bersama dapat mempengaruhi keputusan ekonomi penggunaan laporan keuangan

##### 2. Asumsi Dasar

Entitas menggunakan dasar akrual. Dalam dasar akrual pos pos diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban ketika memenuhi definisi pengakuan pos pos tersebut

##### 3. Konsep perusahaan bisnis

Badan usaha yang tidak berbadan hukum maupun yang berbadan hukum, harus dapat di pisahkan secara jelas dengan pemilik bisnis tersebut maupun dengan bisnis lainnya. Transaksi yang berkaitan dengan bisnis tersebut harus dapat dipisahkan dari transaksi pemilik bisnis, maupun dari transaksi perusahaan lainnya.

#### 2.1.3.4 Proses Penyusunan Laporan

##### 1. Tahap Pencatatan

Pada tahap ini penulis mendapatkan data buku kas dari depo Burdah Water. Penulis kemudian menjurnal per tanggal pengeluaran kas dan pemasukan kas yang terdiri dari pemasukan pendapatan dan biaya biaya yang di keluarkan perusahaan. Kemudian dari jurnal di posting ke akun buku besar masing-masing data

##### 2 Tahap Pengikhtisaran

Dari jurnal dan buku besar maka peneliti menyusun neraca saldo sebelum di sesuaikan, kemudian membuat jurnal penyesuaian, setelah memposting ayat jurnal penyesuaian ke buku besar dan neraca lajur maka akun neraca saldo di sesuaikan .kemudian di klasifikasikan akun neraca dan akun labarugi keetas kerja ini disusun untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan

##### 3 Tahap Pelaporan

Pada tahap ini peneliti menyusun laporan keuangan Burdah Water yang terdiri dari Laporan Laba Rugi, Laporan Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Periode 22/12/2019 sampai dengan 22/01/2020 sesuai SAK UMKM

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Tatik (2018). "Implementasi SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah) Pada Laporan Keuangan UMKM (Studi Kasus Pada UMKM XYZ Yogyakarta." Jurnal Relasi, Vol. .XIV, NO. 02, Juli 2018. Universitas Islam Indonesia.	Implementasi SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah) Pada Laporan Keuangan UMKM (Studi Kasus Pada UMKM XYZ Yogyakarta)	1. Laporan Keuangan PT XYZ Yogyakarta dinyatakan belum lengkap sesuai SAK UMKM Karena hanya disajikan 1 periode saja
2	SriHaryanti, dkk. (2018). "IMPLEMENTASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK EMKM. (Studi Kasus Pada home industry Jamur	IMPLEMENTASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK EMKM. (Studi Kasus Pada	1. Pencatatan Laporan keuangan masih manual dan belum memenuhi standar SAK



	Tiram Dan Jamur Kuping di Desa Ngijo Kabupaten Karanganyar).”seminar nasional dan the 6 <sup>th</sup> call for syariah. Universitas Muhammadiyah Surakarta.	home industry Jamur Tiram Dan Jamur Kuping di Desa Ngijo Kabupaten Karanganyar)	UMKM 2. Pengelolaan Keuangan masih di kelola secara pribadi oleh pemilik perusahaan 3. Peneliti membuat laporan yang sesuai dengan standar SAK EMKM
3	AriNuvitasari, dkk(2019). “Implementasi SAK EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada UD Karya Tangi Banyuwangi.”International jurnal of social sience and	Implementasi SAK EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada UD Karya Tangi Banyuwangi	1. Laporan UD Karya Tangi sangat sederhana dan belum memenuhi standar SAK EMKM 2. UD Karya

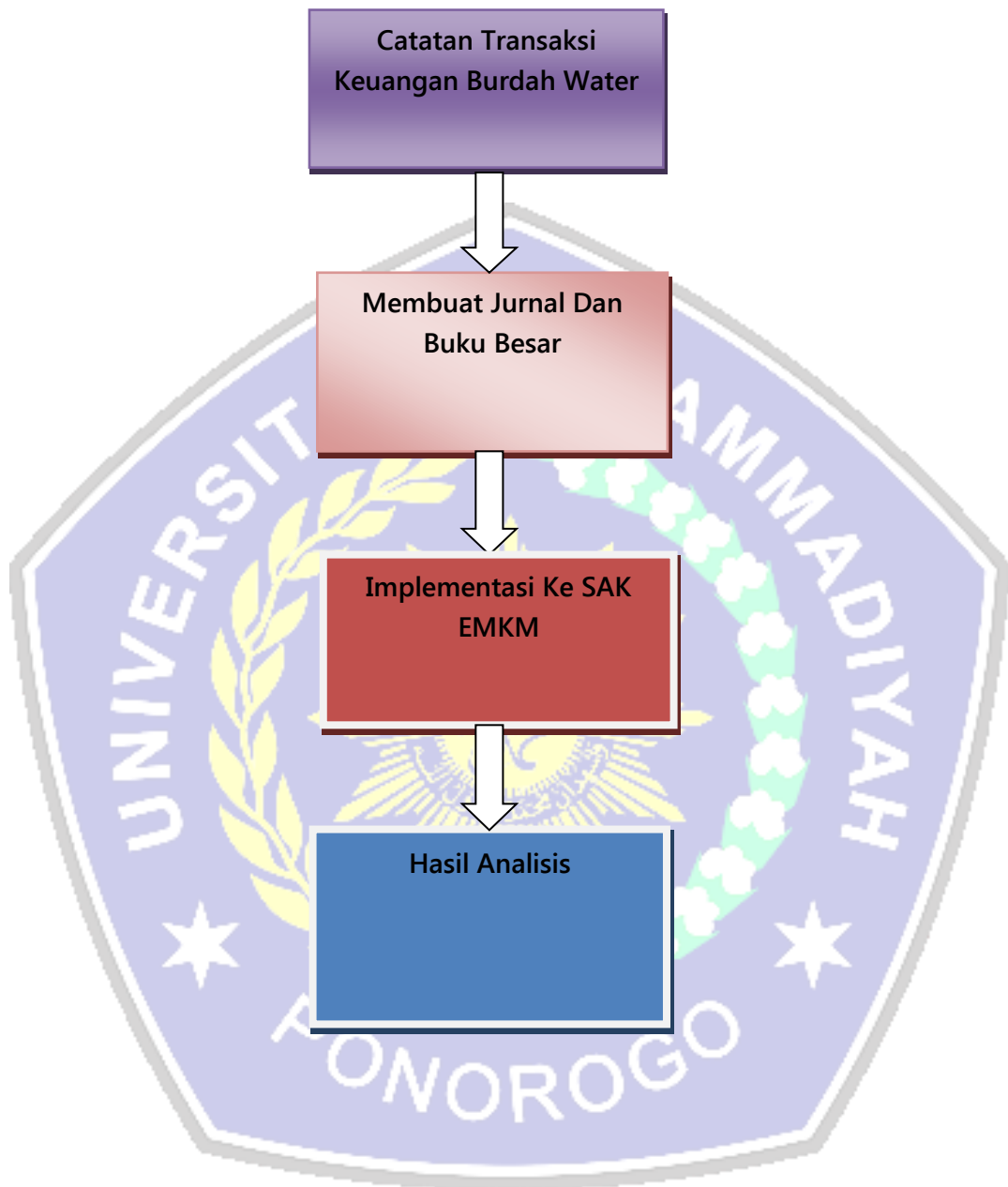
	business volume 3, number 3, tahun 2019. Universitas Muhammadiyah Jember.		Tangi hanya mencatat Data Penjualan, Data Pembelian dan Data pembayaran gaji karyawan
4	Ahmad Solikin, Ade Setiawan (2018). "Kesiapan UMKM Terhadap Implementasi SAK EMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Blora)." <i>Journal of Islamic finance accounting</i> vol 1 no 2 Juni-November 2018. IAIN Surakarta.	Kesiapan UMKM Terhadap Implementasi SAK EMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Blora	1. Banyak UMKM tidak mengetahui tentang adanya SAK UMKM 2. Hasil Penelitian dari 2 UMKM yang ada, penulis menyatakan jika kedua-duanya belum siap dalam penerapan

			<p>SAK UMKM</p> <p>dikarnakan</p> <p>keuangan di</p> <p>catat berbasis</p> <p>kas dan tidak</p> <p>adanya</p> <p>sosialisai dan</p> <p>kesadaran</p> <p>pemilik akan</p> <p>pentingnya</p> <p>SAK EMKM</p> <p>bagi laporan</p> <p>keuangan</p> <p>UMKM</p>
--	--	--	--



Sumber :Ringkasan penelitian terdahulu yang diolah tahun 2020

### 2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Berfikir

Langkah pertama peneliti melakukan penelitian pada pencatatann keuangan yang ada di depo burdah water. Semua pencatatan yang berhubungan dengan aktivitas depo peneliti kumpulkan sebagai bahan penelitian laporan keuangan burdah water.

Langkah kedua setelah peneliti melakukan pengumpulan data terhadap catatam laporam keuangan depo burdah water yang ada kemudian peneliti membuatkan jurnal umum dan buku besar

Langkah ketiga peneliti mencoba mengaplikasikan data keuangan yang di peroleh dari depo brdah water untuk di implementasikan pada SAK EMKM

Langkah terakhir peneliti membandingkan apa saja yang bisa di terapkan dan di akui SAK EMKM sebagai hasil penelitian.

